

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam era kontemporer saat ini. Dalam studi Hubungan Internasional, konflik telah terjadi sejak berabad – abad yang lalu, yang melibatkan negara ataupun kelompok individu. Dalam era kontemporer ini, konflik yang berkembang semakin beragam. Salah satunya adalah konflik antar pemerintah suatu negara dengan salah satu kelompok masyarakat dalam negara tersebut ataupun konflik antar sesama kelompok masyarakat, yang sering disebut sebagai perang sipil. Perang sipil yang berkembang dewasa ini telah menjadi salah satu fenomena yang terus disorot oleh dunia internasional. Hal ini karena perang sipil ini tidak lagi menjadi masalah domestik suatu negara saja, namun juga telah menjadi permasalahan internasional mengingat dampak yang disebabkan juga ikut menjadi persoalan internasional. Salah satu dampak langsung dari perang sipil yang terjadi dalam suatu negara adalah krisis kemanusiaan.

Krisis kemanusiaan merupakan sebuah kondisi dimana manusia tidak mendapat hak – hak dasarnya seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan rasa aman, hingga hak untuk mendapatkan akses keadilan dan kesejahteraan. Benua Afrika merupakan salah satu kawasan yang rawan mengalami konflik secara khusus konflik internal yang berupa perang sipil. Benua Afrika terdiri dari negara – negara yang sebagian besarnya merupakan negara miskin hingga negara – negara berkembang. Konflik – konflik yang

terjadi di kawasan benua ini mengakibatkan timbulnya berbagai masalah sosial pada masing – masing negaranya seperti kemiskinan, pengangguran, kelaparan berkepanjangan, tentara anak, pelanggaran Hak Asasi Manusia, kematian jutaan jiwa tiap tahunnya, yang kemudian menjadi krisis kemanusiaan.

Salah satu fenomena perang sipil yang terjadi di benua Afrika saat ini adalah perang sipil yang terjadi di Sudan Selatan. Perang sipil yang terjadi di Sudan Selatan ini merupakan perang saudara antar etnis. Diketahui bahwa awal mula perang terjadi ketika Sudan Selatan belum merdeka dan masih menjadi bagian dari satu Sudan. Perang saudara antar etnis yang tercipta saat Sudan masih menjadi satu negara ini berawal dari tindakan diskriminasi pemerintah terhadap etnis Afrika di Sudan. Populasi etnis Arab di Sudan lebih kecil dibandingkan populasi etnis Afrika. Namun, etnis Arab diketahui memiliki perwakilan yang lebih banyak di pemerintahan.¹ Dominasi ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Sudan pada saat itu. Etnis Arab diketahui lebih diistimewakan oleh pemerintah, melalui kebijakan – kebijakan yang Islamisasi dan Arabisasi di Sudan bagian Selatan.

¹ Putri Cahyanti. (2017). *Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan*. Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hal. 84-95

Poggo menjelaskan bahwa perang saudara dimulai pada tahun 1955 sebelum Sudan resmi merdeka. Diketahui bahwa Konflik pertama di Sudan terjadi, ketika para tentara di Sudan bagian selatan melakukan pemberontakan akibat ketidakpastian politik.² Pemberontakan ini memicu lahirnya gerakan separatis pada tahun 1972. Pada saat itu, etnis Anyanya yang merupakan etnis Afrika di Sudan bagian Selatan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Sudan. Tak berselang lama, kelompok gerakan separatis ini berganti nama menjadi *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A), yang kemudian mulai menguasai wilayah Sudan bagian selatan. Pada dasarnya, kelompok separatis ini perlakuan adil dan pemenuhan kebutuhan sumber daya dari pemerintah. Untuk mengimbangi dan melawan para pemberontak, pemerintah Sudan juga membentuk pasukan yang diberi nama Janjaweed.³

Untuk menghentikan konflik, pemerintah Sudan dan pemberontak kemudian menandatangani kesepakatan perdamaian *Addis Ababa Peace Accord* (AAPA)⁴, pada tahun 1972. Kesepakatan ini ditandatangani oleh SPLM/A dan Janjaweed untuk menghentikan konflik yang terus terjadi di negara tersebut. Namun, perjanjian ini gagal bertahan yang ditandai dengan pecahnya perang sipil kedua, yang terjadi pada tahun 1983. Perang sipil kedua ini terjadi sejak tahun 1983 hingga tahun 2005. Selama perang

² Poggo, S. (2009). *The First Sudanese Civil War: Africans, Arabs, and Israelis in the Southern Sudan, 1955-1972*. London: Palgrave Macmillan. Hal.49

³ Putri Cahyanti., Op.cit., Hal. 85

⁴ Monica Fahmi. (2012). *Is Identity the Root Cause of Sudan's Civil Wars*. Journal E-International Relations. ISSN 2053-8626. Hal. 3

sipil ini berlangsung, terjadi krisis kemanusiaan besar – besaran di Sudan. Diketahui bahwa pasukan Janjaweed melakukan genosida atau pembersihan etnis di wilayah Darfur bagian Selatan. Terjadi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang masif ketika pasukan Janjaweed mulai melakukan pembunuhan, pemerkosaan perempuan, hingga melakukan penculikan anak – anak.

Berdasarkan pernyataan PBB, sejak tahun 2003 hingga tahun 2008, korban yang tewas akibat perang sipil ini telah mencapai 300.000 orang. Termasuk masyarakat sipil yang meninggal karena penyakit.⁵ Sementara, hingga pada akhir tahun 2012, angka kematian ibu adalah mencapai 2.050 kematian per 100.000 kelahiran baru, kematian akibat malaria mencapai 44.000 orang per tahun; kematian akibat tuberkulosis 228 per 100.000 orang, seperempat balita dan anak – anak mengalami pertumbuhan yang terhambat karena kekurangan gizi kronis, serta angka kematian balita adalah 135 per 1.000 kelahiran.⁶

Setelah berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan, pada tahun 2010 Sudan bagian Selatan memutuskan untuk melakukan referendum pemisahan diri dari Sudan. Referendum ini berlangsung selama 6 hari terhitung sejak 9 Januari hingga 15 Januari

⁵ DW. (2008). *Korban Tewas Konflik Darfur Bisa Mencapai 300.000 Orang*. Diakses melalui <https://www.dw.com/id/korban-tewas-konflik-darfur-bisa-mencapai-300000-orang/a-3287551>

⁶ Joseph Balikuddembe. (2014). *South Sudan's Contemporary Humanitarian Space and Access: An Empirical Analysis of Civil Conflict's Ramifications*. Tehran University of Medical Science. Hal. 7

2011.⁷ Namun, setelah resmi menjadi negara baru pada Juli tahun 2011, Sudan Selatan tidak begitu saja dengan mudah lepas dari perang sipil dan krisis kemanusiaan.

Setelah merdeka menjadi negara independen, perang dan kekerasan semakin meningkat di wilayah Sudan Selatan. Diketahui bahwa dua tahun setelah merdeka, negara kecil ini kembali dihadapkan dengan masalah perang sipil. Puncak perang terjadi ketika Presiden Kiir yang menjabat saat itu, memecat Wakil Presiden Riek Machar, beserta seluruh kabinetnya, setelah tuduhan kudeta. Sejak saat itu, Sudan Selatan kembali memanas. Perang tak terhindarkan terjadi antara tentara pemerintah dan pasukan Machar. Perang ini menyebabkan 1 juta warga Sudan Selatan harus kehilangan tempat tinggal sejak 2013 hingga tahun 2014. Jumlah ini kemudian semakin meningkat di tahun 2015. Selain kehilangan rumah, warga sipil ini juga harus menderita kelaparan dan kesehatan yang memburuk.⁸

Pada tahun 2015, pemerintah Sudan Selatan mengupayakan proses damai melalui gencatan senjata, serta kembali melantik Machar sebagai wakil presiden pada tahun 2016. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, setelah pertempuran kembali pecah antara pasukan Machar dan pasukan pemerintah. Kekerasan terus meningkat selama periode tersebut, yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat sipil. Meski kembali menandatangani perjanjian damai dengan oposisi pada tahun 2018, situasi konflik di Sudan Selatan masih terus berlanjut, meski berskala kecil. Namun

⁷ Monica Fahmi., Op.cit

⁸ ConserUSA.org. 2022. Diakses melalui <https://www.concernusa.org/story/timeline-south-sudan-history/>

dampak nyata perang berkepanjangan selama beberapa dekade terakhir masih ada. Diketahui bahwa pada tahun 2019, sekitar 7 juta warga Sudan Selatan mengalami krisis kelaparan, dan tidak terjamin keamanannya. Sementara itu, perang terus berlanjut hingga perang kembali pecah pada tahun 2020.

Kondisi di Sudan Selatan ini kemudian memicu respon dunia internasional. Salah satunya adalah PBB, sebagai organisasi yang peduli pada perdamaian dunia turut mengambil peran dalam upaya mengatasi masalah – masalah ini. PBB telah banyak mengambil peran dalam masalah Sudan Selatan ini sejak lama. Salah satunya melalui *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA). OCHA merupakan badan koordinasi urusan kemanusiaan PBB. Dalam masalah krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, OCHA telah beberapa kali mengambil peran penting, dalam upaya menanggulangi masalah krisis kemanusiaan tersebut.

Terdapat beberapa argumen utama dan justifikasi penelitian yang melatarbelakangi penelitian ini, diantaranya adalah *pertama*, krisis kemanusiaan di Sudan Selatan telah menjadi krisis ekstrim yang menuntut masyarakat internasional untuk terlibat dalam upaya penanggulangannya. Oleh karena itu, kajian mendalam terkait dengan dinamika krisis dibutuhkan untuk dianalisis lebih lanjut terkait upaya penanggulangan yang efektif. *Kedua*, studi hubungan internasional perlu menganalisis lebih lanjut peran PBB sebagai organisasi internasional dengan misi perdamaian dunia yang mereka yakini untuk mengintervensi konflik dan mengupayakan solusi untuk menyelesaikan konflik. *Ketiga*, penstudi Hubungan Internasional perlu menganalisis

lebih lanjut bagaimana organisasi kemanusiaan seperti OCHA bekerja untuk merespon krisis kemanusiaan, serta dampak dari upaya yang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan ini merupakan bentuk kemunduran dalam proses penerapan prinsip hak asasi manusia. Krisis ini juga kemudian memicu intervensi dunia internasional melalui peran organisasi internasional dalam bidang kemanusiaan. Fokus pembahasan yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai analisis dinamika *human security* atau keamanan manusia dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan sebagai dampak perang sipil, serta peran OCHA dalam upaya menanggulangi masalah tersebut. Adapun rentang waktu yang menjadi batasan dalam penelitian yaitu tahun 2019 – 2021.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana *human security* dan peran OCHA (*Office For The Coordination of Humanitarian Affairs*) sebagai intervensi kemanusiaan dalam krisis di Sudan Selatan tahun 2019-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *human security* dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan tahun 2019 – 2021, serta untuk mengetahui dan memahami peran

OCHA sebagai bentuk intervensi kemanusiaan dalam menanggulangi masalah tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi lingkungan akademik Hubungan Internasional mengenai analisis kompleksitas *human security* dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, serta bagaimana peran dunia internasional melalui tindakan yang diambil OCHA.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik permasalahan, kerangka atau landasan teori yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah, serta kerangka pemikiran yang menjadi acuan dalam penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam proposal penelitian.

